



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, Keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.493.318.846.997,00 berkurang sejumlah Rp. 42.495.526.503,00 sehingga menjadi Rp. 1.450.823.320.494,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a.	Semula	Rp.	1.425.6
b.	Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 6</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.1.426.221.261.154,00	
2. Belanja			
a. Semula		Rp.1.493.318.846.997,00	
b. Bertambah / (Berkurang)		Rp. (42.495.526.503,00)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.450.823.320.494,00</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp. (24.602.059.340,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp. 77.701.886.101,00	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (53.099.826.761,00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 24.602.059.340,00	
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp. 10.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (10.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 0,00	

c. Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	24.602.059.340,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	73.473.556.896,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>136.009.678.844,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	209.483.235.740,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.117.055.460.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(54.968.493.836,00)</u>
Jumlah dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.062.086.966.164,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	235.087.944.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(80.436.884.750,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	154.651.059.250,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	28.129.125.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>134.889.250.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	163.018.375.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	4.432.850.896,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.447.179.519,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	5.880.030.415,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	4.167.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(843.380.895,00)</u>
Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	3.323.619.105,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	36.744.581.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>516.630.220,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	37.261.211.220,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	776.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(108.184.648.836,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	668.115.351.164,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	254.752.550.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	254.752.550.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	86.002.910.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>53.216.155.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	139.219.065.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	00,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	00,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi		
1) Semula	Rp.	106.296.682.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(20.458.420.000,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	85.838.262.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	72.197.662.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(50.558.622.000,00)</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	21.639.040.000,00
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	56.593.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(9.419.842.750,00)</u>
Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	47.173.757.250,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	584.297.592.556,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.460.297.557,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	586.757.890.113,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	909.021.254.441,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(44.955.824.060,00)</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	864.065.430.381,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	467.033.375.722,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.602.879.677,00)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	464.430.496.045,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	10.195.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.716.760.400,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	25.911.760.400,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	00,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	106.069.216.834,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(10.653.583.166,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	95.415.633.668,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	126.814.708.857,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(13.219.680.389,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	113.595.028.469,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	308.086.203.424,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(29.760.996.973,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	278.325.206.450,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	474.120.342.160,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.975.146.698,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	472.145.195.462,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Sejumlah

1) Semula	Rp. 77.701.886.101,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (53.099.826.761,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 24.602.059.340,00

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (10.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 00,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Silpa tahun sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp. 77.701.886.101,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (53.099.826.761,00)</u>
Jumlah Silpa tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 24.602.059.340,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 00,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(10.000.000.000,00)</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.	00,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	00,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I : Ringkasan APBD

Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah

Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX : Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
Pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSIKALIMANTAN TIMUR: 2/107/2016